

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Istilah, Pengertian dan Tujuan Hubungan Internasional Kontemporer	2
B. Hubungan antara Hubungan Internasional dengan Hukum Internasional	8
C. Hubungan Internasional dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Internasional	17
D. Pentingnya Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	21
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP UTAMA HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	25
A. Prinsip Persamaan Kedaulatan (<i>Sovereign Equality</i>)	27
B. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan (<i>Use of Force</i>)	41
C. Prinsip Bertetangga Baik (<i>Good Neighborhood</i>)	51

D. Prinsip Non Intervensi	52
1. Intervensi Langsung dan Tidak Langsung	53
2. Intervensi Intern dan Ekstern	57
3. Intervensi Penghukuman (<i>Punitive</i>)	57
4. <i>Humanitarian Intervention</i> dan <i>Responsibility to Protect</i> (R2P)	58
5. Intervensi atas Permintaan (<i>Intervention by Invitation</i>)	70
6. Intervensi untuk Melindungi Warga Negara dan Asetnya di Luar Negeri	72
 BAB 3 PERAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	 77
A. Istilah, Definisi dan Peran Perjanjian Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer	79
B. Klasifikasi Perjanjian Internasional	82
C. Prinsip-prinsip Utama Hukum Perjanjian Internasional	83
D. Struktur Perjanjian Internasional	85
E. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional	87
F. Praktik Peratifikasian di Indonesia	95
G. Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Hukum Nasional	104
H. Perjanjian Internasional yang Saling Bertentangan	114
I. Masalah-masalah Hukum Terkait Status atau Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Indonesia	117
J. Kewenangan MK Membatalkan UU Ratifikasi dan Dampaknya terhadap Kebersertaan Indonesia	122
K. Kewenangan Daerah Membuat Perjanjian Internasional	131

L.	Prosedur Pengajuan Rencana Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Daerah	136
BAB 4	PERAN HUKUM DIPLOMATIK KONSULER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	141
A.	Pendahuluan	142
B.	Peran Hukum Diplomatik Konsuler dalam Hubungan Internasional Kontemporer	150
1.	Melindungi Kepentingan Negara Pengirim	151
2.	Melindungi Kepentingan Negara Penerima	158
C.	Urgensi Amandemen Konvensi Wina 1961 dan 1963 dalam Hubungan Internasional Kontemporer	162
D.	Pengaturan Hubungan Diplomatik dan Konsuler di Indonesia	163
E.	Kewenangan Daerah Melakukan Hubungan Internasional	173
BAB V	PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	187
A.	Peran Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	188
B.	Peran Hukum Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	192
C.	Kedudukan Inter Government Organization dan International Non Government Organization (INGO) dalam Hukum Internasional	193
D.	Peran PBB Sebagai Organisasi Universal dalam Hubungan Internasional Kontemporer	198
1.	PBB dan <i>Global Governance</i>	198
2.	Struktur Organisasi PBB	200

3.	Peran PBB dalam Menjaga dan Memelihara Perdamaian Keamanan Internasional	203
E.	Peran ASEAN Bagi Stabilitas, Keamanan dan Kesejahteraan Regional	212
1.	ASEAN Sebagai Wadah Kerja Sama Ekonomi Bangsa-bangsa Asia Tenggara	213
2.	ASEAN Way Sebagai Cara ASEAN Menghadapi Berbagai Masalah dan Konflik di Asia Tenggara	214
3.	ASEAN Way Memerlukan Reformasi	220
F.	Hubungan Organisasi Internasional dan Organisasi Regional	225
BAB 6	PERAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL KONTEMPORER	227
A.	Pendahuluan	228
B.	Peran Hukum Perdagangan Internasional dalam Hubungan Ekonomi Internasional Kontemporer	231
C.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Perdagangan Internasional	236
1.	Prinsip Non Diskriminasi	236
2.	Prinsip Preferensi	241
3.	Prinsip Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	243
4.	Prinsip Pengamanan Perdagangan (<i>Safeguard</i>)	244
D.	Kasus-kasus Perdagangan Internasional yang Melibatkan Indonesia	251
BAB 7	PERAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	257
A.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional	258

B.	Hukum Lingkungan Internasional Telah Mengubah Paradigma dari Ekonomi Hijau ke Ekonomi Biru	266
C.	Sumber-sumber Hukum Lingkungan Internasional	267
D.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Lingkungan Internasional	272
E.	Peran Hukum Lingkungan Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	276
BAB 8	PERAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	279
A.	Pendahuluan	280
B.	Peran Hukum Pidana Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	282
C.	Peran Hukum Pidana Internasional Mengatasi Kejahatan Transnasional	285
D.	Peran Hukum Pidana Internasional Mengatasi Kejahatan Internasional	292
E.	Yurisdiksi Universal bagi Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional	296
F.	Prinsip-prinsip Umum Peradilan Pidana Internasional	303
1.	Prinsip Praduga Tak Bersalah (<i>The Presumption of Innocent</i>)	303
2.	Prinsip Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak (<i>The Principle that Judges Must be Independent and Impartial</i>)	304
3.	Prinsip Peradilan yang Cepat dan Adil (<i>Fair and Expeditious Trial Principle</i>)	305
G.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Pidana Internasional	312

BAB 9 PERAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	317
A. Pendahuluan	318
B. Hubungan Antara Hukum HAM internasional dengan Hukum Internasional	321
C. Instrumen Hukum HAM Internasional	326
A. World Conference on Human Rights And Millennium Assembly	328
B. The Right of Self-Determination	328
C. Rights of Indigenous Peoples And Minorities	328
D. Prevention of Discrimination	328
E. Rights of Women	329
F. Rights of The Child	329
G. Rights of Older Persons	329
H. Rights of Persons With Disabilities	329
I. Human Rights In The Administration of Justice: Protection of Persons Subjected To Detention or `Imprisonment	330
J. Social Welfare, Progress And Development	331
K. Promotion And Protection of Human Rights	332
L. Marriage	332
M. Right To Health	332
N. Right To Work And To Fair Conditions of Employment	332
O. Freedom of Association	332
P. Slavery, Slavery-Like Practices And Forced Labour	332
Q. Rights of Migrants	333

R. Nationality, Statelessness, Asylum And Refugees	333
S. War Crimes And Crimes Against Humanity, Including Genocide	333
T. Humanitarian Law	334
D. Prinsip-prinsip Utama Hukum HAM Internasional	334
E. Peran Hukum HAM Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	336
F. Peran Hukum HAM Internasional terhadap <i>Vulnerable Person</i>	336

BAB 10 PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER 353

A. Pendahuluan	354
B. Peran Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	357
C. Prinsip-prinsip Utama Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	358
D. Cara-cara Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional	359
E. Lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa Internasional	391

DAFTAR PUSTAKA 399

GLOSSARY 415

BIODATA PENULIS 419